



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAJAR HUDAYA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 52656

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/248 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 1625 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 1700 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah Seluas 1460 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 721 m2/300 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
7. Tanah Seluas 684 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 545.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 287.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	20.000.700
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	259.421.529
F. HARTA LAINNYA	Rp.	25.000.000
Sub Total	Rp.	8.936.422.229
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.936.422.229

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.